

2.3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas permasalahan yang akan disolusikan ditentukan oleh aspek urgensi dan konektivitas dengan tujuan dan sasaran pembangunan khususnya program pembangunan daerah (RPJMD) dengan prioritas pembangunan daerah (RKPD) pada tahun rencana serta prioritas lain dari mandat kebijakan nasional/provinsi yang bersifat harus dilakukan sebagai bagian tak terpisahkan.

Mekanisme identifikasi permasalahan pembangunan daerah tersebut dilakukan agar permasalahan paling prioritas atau isu strategis daerah, sudah mengakomodasi informasi dari permasalahan yang (mungkin) muncul dari hasil identifikasi kebijakan nasional/provinsi, dinamika lingkungan eksternal dan isu-isu regional, nasional maupun global.

2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

Identifikasi berbagai permasalahan merupakan isi pokok permasalahan dan tantangan pembangunan daerah yang selanjutnya ditetapkan sebagai prioritas rencana kerja pembangunan tahun 2016 dengan tetap mensinkronkan rencana pembangunan daerah dengan prioritas pembangunan provinsi maupun nasional.

Berpijak pada kondisi, hasil evaluasi pembangunan dan identifikasi permasalahan pembangunan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Kota Cilegon, maka **isu strategis** dan **permasalahan pokok** pembangunan Kota Cilegon adalah sebagai berikut:

1. Kualitas sumber daya manusia, kemiskinan dan kesejahteraan sosial

Isu kualitas sumberdaya manusia, kemiskinan dan kesejahteraan sosial merupakan isu yang sangat substansial dalam kerangka pembangunan daerah Kota Cilegon. Hal tersebut terkait dengan fungsi manusia itu sendiri sebagai subjek dan juga sekaligus objek dari kegiatan pembangunan, sehingga seluruh upaya pembangunan pada dasarnya ditujukan untuk menunjang kelangsungan aktivitas manusia. Kesejahteraan sosial masyarakat merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari tujuan pembangunan Kota Cilegon. Taraf kesejahteraan sosial masyarakat merupakan salah satu indikator tercapai atau tidaknya progam-program pembagunan yang telah dilaksanakan.

Tingkat kemiskinan di Kota Cilegon masih menjadi masalah yang perlu ditangani secara cermat dan serius. Meskipun jumlah dan proporsi jumlah rumah tangga miskin sudah terus berkurang, tetapi keberlanjutan terhadap upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Cilegon kedepan ditargetkan mampu menekan kembali proporsi jumlah rumah tangga miskin seoptimal mungkin.

Demikian halnya beban permasalahan sosial semakin beragam dan meningkat akibat terjadinya berbagai krisis sosial, seperti menipisnya nilai budaya, serta meningkatnya ekses dan gejala sosial sebagai dampak dari disparitas kondisi sosial ekonomi masyarakat. Permasalahan sosial perkotaan yang perlu ditangani meliputi masalah prostitusi, kriminalitas, anak jalanan, gepeng, dan penyakit masyarakat lainnya.

Namun dukungan upaya peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat diharapkan mampu menekan angka kematian bayi, balita, dan ibu melahirkan, proporsi balita kurang gizi, serta kesenjangan status kesehatan dan akses terhadap pelayanan kesehatan oleh seluruh kelompok masyarakat. Kualitas kesehatan juga diharapkan didukung dengan peningkatan kemampuan dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.

Sementara itu, angka kemiskinan di Kota Cilegon masih akan menjadi masalah yang perlu ditangani secara cermat dan serius. Meskipun proporsi rumah tangga miskin sepanjang 10 tahun terakhir sudah terus berkurang, tetapi keberlanjutan terhadap upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Cilegon. Di samping itu, tantangan permasalahan sosial yang semakin beragam dan meningkat akibat terjadinya berbagai krisis sosial, seperti menipisnya nilai budaya, meningkatnya ekses dan gejala sosial sebagai dampak dari disparitas kondisi sosial ekonomi masyarakat perlu menjadi perhatian penting dalam kerangka pembangunan lima tahun ke depan. Permasalahan sosial perkotaan yang perlu ditangani diantaranya meliputi masalah PMKS, kriminalitas, anak jalanan, gepeng, dan penyakit masyarakat lainnya.

Issue penting lainnya yang perlu menjadi perhatian adalah issue pengangguran. Dalam hal ini konsep penganggur yang digunakan adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dan pada waktu yang bersamaan mereka tak bekerja (*jobless*), yang disebut dengan pengangguran terbuka (*open unemployment*).

Pertumbuhan lapangan kerja, tentu harus disokong oleh peningkatan investasi di daerah, yang dalam hal ini sangat bergantung pada stabilitas keamanan di daerah dan aspek legislasi dalam hal ini kemudahan birokrasi. Selain itu, peningkatan kualitas SDM juga harus dikedepankan. Untuk mengurangi terjadinya *mismatch* dalam pasar kerja, perlu adanya *link and match* antara pendidikan dan lapangan pekerjaan yang tersedia. Mengacu kepada visi jangka panjang pemerintah daerah sebagai kota industri, perdagangan dan jasa, maka muatan pendidikan seyogyanya lebih diarahkan kepada tiga sector tersebut. Berdasarkan data penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha, ketiga sektor tersebut merupakan sector yang paling banyak menyerap tenaga kerja.

Permasalahan pokok yang terkait dengan kualitas sumberdaya manusia, kemiskinan dan kesejahteraan sosial adalah:

- Aktualisasi norma agama dan tata nilai sosial budaya dalam kehidupan bermasyarakat;
- Pelestarian dan pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya;
- Aksesibilitas, kualitas dan daya saing pendidikan masyarakat;
- Aksesibilitas dan derajat kesehatan masyarakat;
- Perlindungan dan pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
- Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kesejahteraan keluarga;
- Pengendalian kependudukan;

- Kualitas dan peran pemuda dalam pembangunan dan olahraga.

2. Kualitas dan daya saing perekonomian

Struktur perekonomian daerah Kota Cilegon yang didominasi oleh sektor industri, pada satu sisi memberikan dampak positif terhadap tingginya laju pertumbuhan ekonomi daerah, namun di sisi lain dampak negatif yang ditimbulkan yaitu kerawanan sosial serta pencemaran lingkungan. Hal tersebut dikarenakan sektor industri yang berkembang di Kota Cilegon bukan merupakan industri yang berbasis sumberdaya lokal, namun merupakan industri yang padat modal serta membutuhkan tenaga kerja dengan skill atau keahlian khusus. Disamping itu, perekonomian yang didominasi oleh industri strukturnya relatif lemah dan sangat rawan terhadap adanya gejolak perekonomian. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan ekonomi kerakyatan yang berbasis sumberdaya lokal berupa UMKM dan Koperasi harus lebih ditingkatkan kinerjanya agar dapat berperan lebih signifikan dalam perekonomian daerah.

Sementara itu, persaingan perekonomian yang lebih ketat dan kompetitif merupakan tantangan bagi Kota Cilegon seiring dengan diberlakukannya pasar bebas Asean (AFTA) dan pasar bebas Asean-Cina (AC-FTA) yang bisa memberikan peluang bagi perekonomian daerah untuk bersaing di pasar regional dan global sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Globalisasi dan pasar bebas di samping menjadi peluang juga bisa menjadi ancaman apabila daerah tidak memiliki kesiapan untuk menghadapinya. Jika produk-produk lokal tidak efisien dan berkualitas maka akan kalah

bersaing dengan produk asing yang hal ini tentunya akan merugikan ekonomi daerah.

Selain itu, kebutuhan pembangunan fisik kota akan semakin meningkat di masa mendatang, sehingga Sektor Bangunan akan memiliki peran strategis dalam penyediaan lapangan kerja. Sementara itu, Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih lebih merupakan sektor padat modal dan padat teknologi, sehingga perannya dalam penyerapan tenaga kerja tidak sebaik Sektor Bangunan.

Persaingan perekonomian yang lebih ketat merupakan tantangan bagi Kota Cilegon seiring dengan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), pasar bebas Asean (AFTA) dan pasar bebas Asean-Cina (AC-FTA) yang bisa memberikan peluang bagi perekonomian daerah untuk bersaing di pasar regional dan global sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Globalisasi dan pasar bebas di samping menjadi peluang juga bisa menjadi ancaman apabila daerah tidak memiliki kesiapan untuk menghadapinya. Jika produk-produk lokal tidak efisien dan berkualitas maka akan kalah bersaing dengan produk asing yang hal ini akan merugikan ekonomi daerah.

Perekonomian Kota Cilegon yang di dominasi oleh sektor sekunder, tentunya relatif rentan terhadap kondisi perekonomian nasional, terutama dengan munculnya kebijakan pusat, seperti kebijakan kenaikan BBM, kenaikan suku bunga, instabilitas politik, penurunan nilai tukar, dan sebagainya.

Permasalahan pokok yang terkait dengan kualitas dan daya saing perekonomian adalah:

- Stabilitas dan pertumbuhan ekonomi didukung investasi;
- Kualitas perekonomian dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;
- Produktivitas, kualitas dan daya saing perekonomian;
- Pengangguran dan produktivitas tenaga kerja;
- Kerjasama antar daerah dalam penyediaan pangan.

3. Penataan ruang, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Sebagaimana umumnya kawasan perkotaan yang memiliki lahan yang sangat terbatas, Kota Cilegon dihadapkan dengan semakin menurunnya luas lahan terbuka akibat semakin intensifnya penggunaan lahan khususnya untuk permukiman. Dengan kecenderungan demikian, maka konsistensi terhadap implementasi perda penataan ruang harus diupayakan guna mencegah terjadinya konversi lahan yang masif sehingga akan berakibat pada menurunnya daya dukung lahan. Lebih jauh lagi, aktivitas di kawasan perkotaan yang sangat tinggi tanpa diimbangi oleh upaya pengendalian lingkungan, pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan yang akan sangat merugikan bagi kelangsungan pembangunan.

Sebagaimana umumnya kawasan perkotaan yang memiliki lahan yang sangat terbatas, Kota Cilegon dihadapkan dengan semakin menurunnya luas lahan terbuka akibat semakin intensifnya penggunaan lahan khususnya untuk permukiman. Dengan kecenderungan demikian, maka konsistensi terhadap implementasi perda penataan ruang harus diupayakan guna mencegah terjadinya konversi lahan yang masif sehingga akan

berakibat pada menurunnya daya dukung lahan. Lebih jauh lagi, aktivitas di kawasan perkotaan yang sangat tinggi tanpa diimbangi oleh upaya pengendalian lingkungan, pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan yang akan sangat merugikan bagi kelangsungan pembangunan.

Permasalahan pokok yang terkait dengan peningkatan daya dukung dan kualitas pelayanan prasarana, sarana dan fasilitas kota adalah:

(1) Kemacetan dan pelayanan transportasi yang belum mencapai tingkatan nyaman, aman, terjangkau dan ramah lingkungan

Ditinjau dari sudut pandang mikro, kemacetan yang terjadi dapat ditimbulkan oleh akumulasi dari ketidakdisiplinan pengguna jalan, pelanggaran penggunaan trotoar bagi kegiatan sektor informal (pedagang kaki lima), dan pengelolaan parkir yang buruk. Sedangkan dari sudut pandang makro, kemacetan disebabkan oleh ketimpangan antara kemampuan pelayanan sistem pusat pelayanan kegiatan dengan kapasitas dan volume pergerakan serta melebihinya (over-burden) daya tampung pelayanan jalur protokol kota di mana secara spasial posisinya terlalu dekat dengan pusat-pusat permukiman. Kondisi ini diperparah dengan jarak antar bukaan jalan yang relatif berdekatan sehingga stagnasi kendaraan terakumulasi menjadi sebuah kemacetan. Keberadaan sarana angkutan umum pun belum mampu menjadi alternatif dalam melakukan pergerakan sehingga penggunaan kendaraan pribadi menjadi pilihan utama. Hal ini perlu menjadi isu strategis agar sistem

perencanaan kota ke depan dapat mengatur pola pergerakan kawasan perkotaan sehingga menjadi lebih efektif.

(2) Kualitas kondisi dan kinerja jaringan jalan

Secara umum kondisi jalan di Kota Cilegon cukup baik dalam arti mampu menghubungkan antar sistem pusat pelayanan perkotaan. Dengan semakin tingginya konsentrasi pengembangan lahan perlu ditunjang oleh perencanaan sistem jaringan jalan yang mampu menjadi inisiator dalam setiap kegiatan pengembangan lahan sehingga struktur ruang kota menjadi lebih terbentuk. Penyertaan saluran drainase jalan pun perlu menjadi bagian dalam perencanaan jalan mengingat kerusakan struktur jalan lebih disebabkan oleh sistem drainase jalan yang buruk selain tonase kendaraan yang melintasi jalan melebihi batas.

Kinerja jaringan jalan diukur dari seberapa besar kapasitas jalan baik secara fungsional maupun struktural mampu menampung beban pergerakan serta meningkatkan nilai aksesibilitas kawasan. Kinerja jaringan jalan perlu disertai dengan pengendalian ruang jalan dan pepaduserasian dengan karakteristik aktivitas di sekitarnya. Menurunnya kinerja jaringan jalan dapat dilihat antara lain diindikasikan dengan meningkatnya frekuensi kemacetan, rusaknya struktur jalan, serta lambatnya pertumbuhan kawasan. Ruas jalan protokol dan ruas jalan yang secara langsung terkoneksi dengan jalan protokol menjadi objek penting dalam kaitannya dengan peningkatan kinerja sistem transportasi.

(3) Bencana banjir

Banjir menjadi permasalahan pokok, karena fenomena ini sering terjadi terutama pada musim penghujan. Sebagian besar penyebab banjir di Kota Cilegon antara lain tidak terintegrasinya sistem drainase kawasan, peningkatan volume larian air di bagian hulu sebagai efek dari tingginya pembukaan lahan, sedimentasi drainase dan pantai, dan berkurangnya kemampuan infiltrasi tanah terhadap air hujan. Di samping menimbulkan berkurangnya kenyamanan, banjir pun akan berdampak pada menurunnya kualitas jalan dan kesehatan lingkungan.

(4) Ketersediaan air baku serta cakupan dan kualitas pelayanan air bersih

Perlu disadari bahwa Kota Cilegon tidak memiliki sumber air baku. Selama ini kebutuhan air baku untuk pelayanan kebutuhan air bersih dipasok dari rawa Cidanau (Kabupaten Serang). Meningkatnya kebutuhan air ini tidak disertai dengan bertambahnya jumlah air baku sehingga berpengaruh terhadap pelayanan air bersih. Di sisi lain masyarakat menuntut pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik, salah satunya adalah peningkatan cakupan pelayanan air bersih (terutama berbasis perpipaan).

(5) Cakupan dan kualitas pelayanan persampahan

Pengelolaan persampahan yang terdapat di Kota Cilegon sampai saat ini belum dapat menjangkau seluruh wilayah permukiman. Daerah pelayanan masih terbatas pada jalan utama dan beberapa kawasan permukiman saja. Hal ini disebabkan oleh adanya keterbatasan dan kendala dalam pemenuhan efisiensi dan efektivitas pengelolaan, keterbatasan sistem operasional persampahan dan pendekatan/teknologi yang digunakan, serta belum adanya mekanisme kerjasama dalam pengelolaan sampah dari pemilahan, pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan hingga pembuangan akhir. Saat ini isu pengelolaan persampahan telah beralih dari paradigma kumpul – angkut – buang ke arah 3R (Reduce, Reuse, Recycle) di mana peran TPA merupakan tempat penampungan sampah yang memang sudah tidak dapat lagi diolah. Selain itu isu strategis lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan sampah yaitu perlu adanya perubahan metode pengelolaan sampah di TPA yang semula menggunakan sistem open-dumping beralih ke controlled-landfill menuju sanitary landfill.

(6) Kualitas pelayanan pengelolaan limbah

Pembuangan air kotor (mandi dan cuci) pada saat ini bergabung dengan sistem drainase, hal ini dapat menurunkan kualitas air permukaan di sungai-sungai yang menjadi saluran primer drainase. Untuk itu selayaknya dibatasi pembuangan air kotor secara langsung ke badan air (saluran drainase) serta dilakukan upaya pemisahan antara

saluran air kotor dengan saluran drainase. Jenis pengelolaan air limbah domestik sebagian besar masih berorientasi pada sistem on-site sanitation. Sedangkan sistem off-site sanitation baru dikembangkan pada beberapa kawasan permukiman padat (MCK, WC umum). Sistem pengelolaan limbah domestik yang lebih modern seperti sewerage system belum diaplikasikan, padahal sistem ini berpeluang untuk mengatasi pembuangan limbah domestik ke badan air secara langsung. Untuk jenis limbah industri sebagian besar telah dikelola secara internal melalui penerapan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah). Meskipun demikian pengawasan dan pemantauan atas kualitas mekanisme pengelolaan limbah terutama untuk jenis B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya) perlu mendapat perhatian mengingat tingginya dampak yang dapat ditimbulkan apabila tidak dikelola secara baik.

(7) Penyediaan dan kualitas rumah layak huni dan terjangkau

Kebutuhan akan hunian akan semakin bertambah seiring dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk. Tingginya nilai lahan perkotaan tentunya menjadi pertimbangan tersendiri dalam upaya penyediaan lahan bagi rumah layak huni. Apabila isu ini tidak diperhatikan secara spesifik, maka jumlah permukiman padat-kumuh dipastikan akan bertambah. Dengan demikian perlu adanya pendekatan yang strategik dalam mengatasi penyediaan rumah layak huni, misalnya melalui program penyediaan rumah susun.

(8) Kawasan permukiman kumuh

Permukiman kumuh dicirikan dengan struktur jalan yang organik, jarak antar bangunan yang padat, serta kondisi lingkungan yang tidak tertata. Kawasan permukiman kumuh merupakan permasalahan pembangunan jangka menengah karena apabila tidak ditangani secara simultan akan berakibat pada menurunnya tingkat kesehatan lingkungan, rawan bencana kebakaran, konflik sosial dan kriminalitas, serta menurunnya identitas dan estetika kota. Berdasarkan studi tentang kawasan kumuh, terdapat 14 titik kawasan kumuh yang perlu mendapatkan perhatian agar kawasan tersebut tidak semakin menurun kualitasnya.

Permasalahan pokok yang terkait dengan peningkatan daya dukung dan kualitas lingkungan hidup dan penataan ruang adalah:

(1) Lingkungan Hidup

Dalam kurun waktu 5 tahun ke depan, secara umum Kota Cilegon akan mengalami perubahan geomorfologi dan lingkungan hidup. Penurunan kualitas lingkungan hidup karena faktor manusia jika tidak diantisipasi akan terus meningkat. Pencemaran air, udara, dan tanah di Kota Cilegon berpotensi meningkat seiring dengan kemajuan pembangunan dan perubahan pola hidup masyarakat. Peningkatan pengendalian dan penanggulangan pencemaran perlu diupayakan pada kawasan-kawasan potensi pencemaran, khususnya kawasan industri, kawasan pelabuhan dan kawasan permukiman.

Namun harus digarisbawahi bahwa meskipun telah disusun mekanisme pengendalian dampak lingkungan,

akan tetapi pengelolaan lingkungan hidup yang parsial hanya akan mampu memperlambat penurunan kualitas lingkungan saja dan tidak mampu menyelesaikan masalah sampai tuntas. Beberapa wilayah yang menjadi pusat kegiatan industri seperti di Kelurahan Kepuh, Kelurahan Randakari, Kelurahan Gerem, Kelurahan Suralaya, Kelurahan Lebakgede, dan beberapa wilayah lainnya telah terindikasi sebagai daerah yang telah menurun kualitas lingkungannya seperti polusi udara yang tinggi, debu batubara dan bau dari limbah industri yang tidak sedap, kebisingan, meningkatnya penderita ISPA, menurunnya kualitas dan kuantitas air tanah, dan sebagainya.

Selain pencemaran, Kota Cilegon menghadapi ancaman krisis energi, krisis lahan, dan krisis air bersih karena sebagian besar wilayahnya berbatasan dengan pesisir. **Krisis energi** terkait dengan semakin tingginya permintaan akan kebutuhan energi seiring dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk. Sementara **krisis lahan** terkait dengan semakin terbatasnya lahan bagi aktifitas penduduk serta adanya kerusakan lahan yang salah satunya diakibatkan oleh kegiatan pertambangan Galian C. Adapun **krisis air bersih** terkait dengan semakin berkurangnya kualitas dan kuantitas air permukaan maupun air tanah.

Meningkatnya laju pertumbuhan penduduk dan intensitas kegiatan baik industri maupun non-industri akan berdampak pada semakin tingginya demand akan kebutuhan air. Kondisi tersebut dipertegas dengan potensi air baku yang rendah sehingga kebutuhan air dipenuhi melalui pemanfaatan air bawah tanah. Pengambilan air

bawah tanah tanpa disertai dengan langkah konservasi air tentunya akan menimbulkan serangkaian dampak seperti rongga bawah tanah yang memicu deformasi tanah dan subsident, intrusi air laut, dan kelangkaan air tanah. Indikasi dari berkurangnya kualitas dan kuantitas air tanah dapat ditelusuri dari adanya perubahan warna dan rasa air tanah di sekitar peisisir pantai yang diakibatkan oleh intrusi air laut dan peningkatan derajat kekeruhan air sebagai cerminan dari adanya kejenuhan material tanah/lumpur dalam air.

Bencana alam dan bencana industri masih merupakan ancaman bagi Kota Cilegon dalam kurun waktu 5 tahun mendatang, diantaranya ancaman yang bersumber dari aktifitas Gunung Krakatau, maupun potensi terhadap dampak aktifitas gempa dan tsunami yang terjadi di daerah selatan Pulau Jawa, dimana salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah dampak yang lebih luas atas bencana tersebut terkait dengan keberadaan industri-industri kimia pada kawasan pesisir. Sehingga tantangan dimasa mendatang adalah dengan meningkatkan kemampuan pengelolaan lingkungan dalam pencegahan dan penanggulangan bencana (tanggap darurat).

Isu pembangunan berkelanjutan juga menjadi paradigm pembangunan yang saat ini terus bergulir seiring dengan merebaknya isu global warming yang ditimbulkan oleh kepadatan aktivitas dan jumlah manusia tanpa mengindahkan upaya pelestarian lingkungan. Pembangunan tanpa adanya pengelolaan lingkungan tentunya akan berakibat pada keberlanjutan pembangunan bagi generasi mendatang.

Maka pelestarian kawasan pesisir perlu menjadi isu strategis karena kondisi garis pantai saat ini hampir 70% telah terisi oleh kegiatan budidaya baik industri, pelabuhan, permukiman, sarana kota, dan bangunan komersil serta peran Selat Sunda sebagai jalur perairan internasional. Dampak yang perlu diperhitungkan bukan hanya terhadap kelestarian kawasan pesisir semata, akan tetapi pengelolaan yang tidak terintegrasi akan berdampak pada eksistensi dan kelangsungan penyelenggaraan kegiatan dan investasi di kawasan pesisir. Sedangkan daerah perbukitan di bagian utara dan selatan kota perlu dikelola dan dilestarikan karena perannya yang sangat penting sebagai pelindung kawasan perkotaan dari hempasan angin laut yang membawa material polutan dari kawasan industri, kawasan konservasi dan ruang terbuka hijau, penyerap air hujan, dan penyeimbang kualitas lingkungan. Tidak kalah strategis pula peran sungai-sungai yang tersebar sebagai bagian dari sistem drainase kota. Tanpa pengelolaan atasnya, maka fenomena banjir dan genangan air akan berdampak sistemik terhadap kelestarian fasilitas kota dan kualitas lingkungan.

(2) Penataan Ruang

Terkait dengan pemanfaatan ruang, permasalahan utama yang terjadi saat ini adalah masih banyaknya pelanggaran tata ruang, baik berupa pelanggaran fungsi ruang maupun pelanggaran tata bangunan dan lingkungan. Hal ini antara lain disebabkan oleh : (1) belum memadainya ketersediaan dasar hukum pelaksanaan penataan ruang baik yang

bersifat umum maupun rinci, sebagai landasan operasional yang sangat penting bagi penanganan masalah penataan ruang; (2) kurangnya SDM yang menguasai masalah penataan ruang; (3)kurang berfungsinya lembaga koordinasi penataan ruang di daerah, merupakan hal yang menyebabkan belum optimalnya pembinaan penataan ruang di daerah; (4) Terbatasnya jumlah personil penataan ruang serta (5)kurangnya peran serta masyarakat dalam pengawasan penataan ruang

4. Peningkatan daya dukung dan kualitas pelayanan prasarana, sarana dan fasilitas kota

Peningkatan daya dukung dan pelayanan prasarana dan sarana serta fasilitas kota merupakan hal yang krusial dilakukan. Hal tersebut mengingat dampak yang sangat signifikan yang dapat ditimbulkan akibat kurang memadainya daya dukung infrastruktur tersebut, baik dampak secara sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Secara sosial, dampak yang ditimbulkan akibat keterbatasan infrastruktur wilayah adalah semakin meningkatnya kerawanan sosial yang mengancam ketentraman dan ketertiban umum. Dari sisi ekonomi, dampak yang ditimbulkan adalah menurunnya aksesibilitas pergerakan barang dan angkutan sehingga kegiatan koleksi dan distribusi menjadi terganggu. Adapun dari sisi lingkungan, berbagai dampak yang dapat ditimbulkan diantaranya banjir, kawasan kumuh, kurangnya suplai air bersih, dll.

Permasalahan pokok yang terkait dengan peningkatan daya dukung dan kualitas pelayanan prasarana, sarana dan fasilitas kota adalah:

- 1) Kemacetan dan pelayanan transportasi yang nyaman, aman, terjangkau dan ramah lingkungan;
- 2) Kualitas kondisi dan kinerja jaringan jalan;
- 3) Bencana banjir;
- 4) Ketersediaan air baku serta cakupan dan kualitas pelayanan air bersih;
- 5) Cakupan dan kualitas pelayanan persampahan;
- 6) Kualitas pelayanan pengelolaan limbah;
- 7) Rawan bencana kebakaran;
- 8) Cakupan dan kualitas pelayanan telekomunikasi, telematika dan informatika;
- 9) Distribusi, kapasitas, dan kualitas fasilitas perdagangan tradisional dan modern;
- 10) Kualitas pelayanan fasilitas jasa;
- 11) Penyediaan dan kualitas rumah layak huni dan terjangkau;
- 12) Kawasan kumuh permukiman.

5. Kinerja pemerintahan dan pelayanan publik serta kualitas ketentraman, ketertiban, demokrasi dan hukum

Kinerja pemerintahan dan pelayanan publik serta kualitas ketentraman, ketertiban, demokrasi dan hukum merupakan faktor kunci keberhasilan pembangunan di Kota Cilegon. Kinerja birokrasi yang efisien dan efektif dengan sistem

kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang profesional dan akuntabel pada gilirannya dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Dengan meningkatnya pelayanan kepada masyarakat maka diharapkan masyarakat akan semakin produktif dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahateraan.

Permasalahan pokok yang terkait dengan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik serta kualitas ketentraman, ketertiban, demokrasi dan hukum adalah:

- Kinerja penyelenggaraan pemerintahan;
- Kualitas dan daya saing pelayanan publik;
- Kapasitas dan kemandirian keuangan daerah;
- Kualitas kehidupan demokrasi;
- Ketaatan dan supremasi hukum;
- Kondusifitas ketentraman dan ketertiban umum.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan pemerintah untuk bekerjanya fungsi-fungsi yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi yang menjadi kewenangannya dalam melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

Input utama dari perumusan permasalahan tiap urusan ini adalah hasil analisis daerah, khususnya ekonomi kinerja pembangunan

daerah, capaian berbagai program dan kebijakan di periode lalu yang diperoleh dari laporan realisasi (dokumen) perencanaan pembangunan daerah. Berbekal materi, pemahaman dan hasil analisis tersebut, tiap-tiap urusan diuraikan berdasarkan permasalahan dan keterkaitannya dengan SKPD yang ada didalamnya.

Oleh setiap SKPD, harus diuraikan permasalahan yang paling krusial tentang layanan dasar dan tugas/fungsi SKPD dengan menilik capaian kinerja yang masih jauh dari harapan dan target yang ditetapkan dalam RPJMD. Masing-masing permasalahan yang ada kemudian diuraikan lagi untuk mengetahui faktor-faktor, baik secara internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut. Identifikasi permasalahan dilakukan pada bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan tiap urusan. Berikut ini diuraikan mengenai **permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah** yang diperkirakan masih dihadapi oleh Kota Cilegon pada tahun 2014.

1. Urusan pendidikan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pendidikan, yaitu :

- 1) Masih rendahnya partisipasi pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini sebagai akibat kurang memadainya sarana prasarana, kualifikasi tenaga pendidik dan lembaga PAUD belum memenuhi, serta kurangnya kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anaknya sejak usia dini.

- 2) Belum merata dan kurangnya tenaga pendidik sebagai akibat banyaknya tenaga pendidik PNS yang memasuki masa purna tugas, khususnya pada jenjang Sekolah Dasar.
- 3) Pemberlakuan kurikulum baru 2013 yang berbeda dengan kurikulum-kurikulum sebelumnya karena menekankan pembelajaran tematik terpadu memerlukan kesiapan, khususnya bagi tenaga pendidik.
- 4) Masih adanya tenaga pendidik yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi sesuai standar yang ditetapkan.
- 5) Belum memadainya kualitas dan sarana prasarana pendidikan formal dan non formal,
- 6) Kurangnya sumber daya, kompetensi dan kualifikasi pustakawan dan laboran.
- 7) Terjadinya degradasi moral, kenakalan remaja dan anak sekolah.
- 8) Perlunya revitalisasi peran Buku agar eksistensinya bisa terus terjaga dengan baik.

2. Urusan Kesehatan

Permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan urusan kesehatan, yaitu :

- 1) Angka kesakitan dan kematian penyakit menular dan tidak menular masih tinggi.
- 2) Angka kesakitan demam berdarah cenderung makin tinggi, penemuan infeksi HIV dan AIDS tiap tahun cenderung meningkat, serta adanya ancaman pandemic flu burung.

- 3) Perlunya peningkatan lingkungan baik sanitasi dasar seperti cakupan air bersih, cakupan jamban keluarga, cakupan sarana pembuangan air limbah rendah, serta proporsi rumah tangga sehat rendah.
- 4) Penerapan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di masyarakat masih rendah.
- 5) Perlunya perluasan peran serta masyarakat di bidang kesehatan melalui UKBM (Usaha Kesehatan Berbasis Masyarakat-Posyandu)
- 6) Masih belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi data terkait kesehatan dengan pihak terkait (database)
- 7) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan

3. Urusan Pekerjaan Umum

Secara umum penyelenggaraan urusan pekerjaan umum di Kota Cilegon telah cukup baik, berupa penyediaan infrastruktur perkotaan yang meliputi: prasarana perhubungan darat, prasarana air bersih, prasarana sanitasi, prasarana drainase, prasarana irigasi dan prasarana dasar permukiman. Tantangan utama yang sedang dihadapi yaitu:

- 1) Masih banyaknya air limbah yang masuk ke saluran irigasi.
- 2) Masih perlunya penambahan jaringan jalan yang menghubungkan Pusat kegiatan, terutama di sisi Selatan dan Utara wilayah Kota Cilegon.
- 3) Secara fisik kondisi ruas jalan sudah dalam kondisi mantap, tapi masih perlu pemeliharaan rutin berkala.

- 4) Perlu adanya normalisasi geometri jalan, dikarenakan semakin menurunnya kecepatan di ruas jalan dibanding kecepatan rencananya.
- 5) Belum terpenuhinya semua kebutuhan pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya dalam mendukung pembangunan pertanian dan penyediaan air baku.
- 6) Hampir seluruh sistem drainase perkotaan menggunakan sistem campuran.
- 7) Belum optimalnya kinerja prasarana dan sarana air bersih, sanitasi, dan persampahan terutama di lingkungan masyarakat berpenghasilan rendah.
- 8) Masih adanya jalan dan jembatan yang rusak. Prasarana jalan dan jembatan senantiasa membutuhkan pemeliharaan dan peningkatan.
- 9) Rendahnya kualitas pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung Pemerintah diakibatkan tidak dipatuhinya NSPM dan rendahnya sosialisasi serta pengawasan pelaksanaan NSPM.
- 10) Belum berkembangnya jasa konstruksi karena kurangnya pembinaan dan pengawasan serta belum mantapnya mekanisme sertifikasi kompetensi

4. Urusan Perumahan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan perumahan yaitu:

- 1) Masih adanya pemukiman kumuh dan rumah tidak layak huni di Kota Cilegon.
- 2) Keterbatasan lahan dan semakin tingginya harga tanah di wilayah perkotaan menjadi kendala dalam penyediaan rumah layak huni.
- 3) Belum optimalnya pemanfaatan lahan dengan pola pembangunan vertikal terutama pada kawasan-kawasan permukiman yang padat.
- 4) Belum optimalnya upaya pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukimannya.
- 5) Belum optimalnya upaya pemeliharaan terhadap sarana permukiman yang ada guna memperpanjang usia pakai sarana tersebut.
- 6) Masih perlunya peningkatan kualitas prasarana dasar permukiman perkotaan, yang meliputi prasarana jalan lingkungan, prasarana drainase lingkungan, prasarana air bersih lingkungan, serta prasarana sanitasi lingkungan.
- 7) Lemahnya konsolidasi dan koordinasi komunitas perumahan dalam pengelolaan, pemeliharaan serta sharing pembangunan termasuk pembiayaan perumahan dan infrastrukturnya.

5. Urusan Penataan Ruang

Permasalahan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan penataan ruang adalah:

- 1) Kinerja Badan koordinasi Penataan Ruang daerah (BKPRD) belum optimal dalam memfasilitasi penyelenggaraan penataan ruang, mulai dari pengaturan (dalam hal upaya

pembentukan landasan hukum dalam penataan ruang), pembinaan (dalam hal upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang), pelaksanaan (dalam hal upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang), dan pengawasan penataan ruang (dalam hal upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan).

- 2) Masih lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang (masih berupa sanksi administratif) dan belum diaturnya mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dalam pemanfaatan ruang;
- 3) Belum optimalnya pengembangan sistem informasi kepada masyarakat dibidang penataan ruang;
- 4) Konflik pemanfaatan ruang daerah perbatasan;
- 5) Rendahnya partisipasi masyarakat dalam penataan ruang, baik dalam perencanaan ruang (keterlibatan dalam proses penyusunan), pemanfaatan dan pengendalian ruang (pengurusan ijin pemanfaatan ruang);
- 6) Ketersediaan RTH publik di Kota Cilegon belum memenuhi amanah Undang-undang RI No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang.

6. Urusan Perencanaan Pembangunan

Permasalahan yang dihadapi pada penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan yaitu:

- 1) Sinergisitas proses perencanaan pembangunan daerah dari pendekatan politik (proses politik) ke pendekatan

teknokratik perlu dilakukan dengan pemahaman yang sama antara lain terkait perumusan pokok-pokok pikiran DPRD.

- 2) Perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang belum konsisten yang perlu terus dilakukan minimalisasi deviasi, antara lain dengan integrasi sistem informasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi.
- 3) Adanya ego atau kepentingan antarsektor yang mengakibatkan adanya kesulitan dan miskoordinasi. Disamping itu persoalan yang bersifat lintas sektor seringkali ditangani secara parsial dan terfragmentasi sehingga cenderung tidak menyentuh atau menyelesaikan persoalan yang sebenarnya.
- 4) Perlunya pemahaman yang sama di SKPD terkait urgensi dan signifikansi perencanaan pembangunan daerah beserta indikator-indikator keberhasilan di masing-masing urusan yang diemban pada setiap level struktural. Hal ini akan meningkatkan fokus pencapaian indikator sebagai garda depan perencanaan dan penganggaran, bukan perencanaan penganggaran yang inkremental.
- 5) Proses perencanaan teknokratik yang berbasis pada data sekunder dan primer, baik dari hasil monitoring dan evaluasi maupun hasil kajian/telaahan, dianggap masih belum memadai sehingga kekuatan data dan informasi dalam memproyeksikan arah pembangunan berikutnya masih lemah.
- 6) Masih terdapat kesulitan untuk memastikan adanya konsistensi antara perencanaan (program/kegiatan) pembangunan dan alokasi penganggarnya.

- 7) Perlunya optimalisasi monitoring dan evaluasi hasil Renja SKPD maupun RKPD sehingga tahapan dan isu permasalahan bisa disolusikan bersama SKPD dan Bappeda serta implementasi E-Monev untuk kecepatan dan keakuratan serta ketertelusuran progress pelaksanaan Renja maupun RKPD.

7. Urusan Perhubungan

Permasalahan yang dihadapi sehubungan dengan penyelenggaraan urusan perhubungan yaitu:

- 1) Berkurangnya kualitas pelayanan/sarana prasarana yang diberikan bagi pengguna kendaraan umum yang mendukung Kota Cilegon sebagai Kota Industri, Perdagangan dan Jasa.
- 2) Kurangnya disiplin pengguna jalan terhadap rambu-rambu dan aturan-aturan yang berlaku.
- 3) Masih adanya terminal bayangan, di beberapa tempat di Kota Cilegon.
- 4) Kurangnya keterpaduan sistem jaringan jalan.
- 5) Tingginya volume pergerakan/Mobilitas terutama pada jam-jam sibuk yang kurang didukung oleh keterpaduan sistem jaringan jalan sehingga mengakibatkan kecenderungan untuk terjadinya kemacetan dan potensi peningkatan kecelakaan lalu lintas.

8. Urusan Lingkungan Hidup

Permasalahan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan urusan lingkungan hidup yaitu:

- 1) Belum optimalnya kapasitas kelembagaan dalam mendukung pencapaian tujuan pengelolaan lingkungan hidup. Penegakan hukum lingkungan dilakukan berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh PPLHD, dalam UU No 32 tahun 2009 pengawasan dilakukan oleh PPLH yg merupakan pejabat fungsional ditetapkan melalui SK Walikota.
- 2) Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan usaha/industri terkait dengan pengendalian dan pemanfaatan sumber daya sehingga daya dukung. Hal ini karena kurangnya kontrol terhadap kegiatan usaha/industri dalam pelaksanaan dan pelaporan dokumen lingkungan sehingga menyebabkan kurangnya data primer dalam menetapkan status mutu air pada kegiatan industri.
- 3) Masih kurangnya ketatalaksanaan yang tersedia sesuai dengan kebutuhan organisasi. Hal ini sejalan dengan belum tersusunnya Perwal/Perda tentang izin pengelolaan lingkungan hidup secara lengkap salah satunya adalah izin IPLC.
- 4) Perubahan regulasi dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat dan pengelolaan aset. Perubahan regulasi didasarkan Permendagri 32 tahun 2011 dan 39 tahun 2012 tentang HIBAH dan BANSOS yg bersumber dari APBD sehingga berpengaruh dalam pembangunan IPAL untuk masyarakat/UKM.

5) Belum optimalnya penanganan sampah perkotaan, dilihat dari :

- ☞ Masih rendahnya pemilahan sampah rumah tangga, composting sampah dan kegiatan 3R di masyarakat;
- ☞ Pelayanan penyapuan jalan di jalan utama belum mencapai 100%;
- ☞ Karakteristik beberapa tempat penampungan sampah (baik berupa transfer depo dan TPS) yang belum mengakomodir penampungan sampah terpilah;
- ☞ Belum adanya kegiatan komposting sampah di TPS;
- ☞ Pengangkutan sampah yang belum terpilah (masih tercampur organik dan anorganik);
- ☞ keterbatasan lahan untuk Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah.

9. Urusan Pertanahan

Permasalahan dalam bidang pertanahan adalah :

- 1) Sulitnya pengendalian penggunaan lahan. Antara lain disebabkan karena persepsi bahwa dengan kepemilikan lahan yang dimiliki oleh masyarakat sendiri masyarakat berhak mengelola/menggunakannya sesuai dengan keinginan sendiri.
- 2) Banyaknya konversi lahan pertanian menjadi non pertanian, utamanya pada sektor industry, perumahan/properti. Peruntukan penggunaan tanah sawah untuk lahan berkelanjutan tidak dapat berjalan.

- 3) Terbatasnya ketersediaan lahan yang akan dijadikan dan ditetapkan sebagai lahan sawah berkelanjutan sebagai penopang ketersediaan pangan baik tingkat Provinsi maupun nasional.
- 4) Penyediaan tanah untuk pemukiman atau perumahan belum memenuhi kebutuhan, sehingga berkembang rumah kumuh di perkotaan dengan intensitas yang tidak terkendali.
- 5) Belum teridentifikasi tanah negara/tanah terlantar secara detail (data base) belum akurat.
- 6) Belum adanya insentif dan desinsentif dibidang pertanahan.

10. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan ini yaitu:

- 1) Masih kurangnya SDM pelayanan administrasi kependudukan, baik dari segi jumlah maupun kompetensinya.
- 2) Fungsi koordinasi kurang optimal yang mengakibatkan data kependudukan menjadi kurang akurat.
- 3) Sistem teknologi informasi yang sudah ada masih belum bisa mem-back up arsip pencatatan sipil dan belum dapat memilah data akte kelahiran per kelompok umur.
- 4) Masih kurangnya partisipasi masyarakat yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman akan pentingnya dokumen kependudukan.

11. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Masalah yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu:

1. Perlunya pemantapan program PUG dan PUHA mengingat masih kurangnya pemahaman tentang hak perempuan dan hak anak
2. Program Pangarus Utama Gender masih dianggap sebagai program untuk mengejar ketertinggalan perempuan sehingga dapat setara dengan laki-laki
3. Perlunya sosialisasi dan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak
4. Kurangnya fungsi focal point gender dalam menyampaikan informasi program gender dan pembuatan laporan PUG
5. Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) belum dapat diimplementasikan dalam perencanaan pembangunan

12. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Beberapa hal yang masih terus mendapat perhatian dalam rangka penyelenggaraan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera yaitu:

- 1) Masih kurangnya kapasitas dan kuantitas tenaga penyuluh KB
- 2) Perlunya sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi kaum pria dalam program KB melalui MOP
- 3) Perlunya peningkatan kualitas sarana/prasarana dan profesionalisme SDM aparatur dalam pelayanan KB

- 4) Perlunya Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) sebagai sarana peningkatan ekonomi keluarga terutama keluarga KB aktif
- 5) Perlunya pembinaan kesehatan reproduksi remaja yang intensif dan berkelanjutan.

13. Urusan Sosial

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka penyelenggaraan urusan sosial yaitu:

- 1) Kurang maksimalnya penanganan pengemis, gelandangan dan orang terlantar (PGOT) seperti belum adanya tempat penampungan sementara untuk pembinaan, belum terdaftar dalam Program BPJS sehingga belum terlayani asuransi kesehatannya, kurangnya koordinasi antar Kab/ Kota dan banyaknya modus sebagai orang terlantar sehingga dijadikan penghasilan dengan hidup berpindah-pindah antar kota.
- 2) Penanganan lansia masih kurang karena data lansia yang tidak valid sehingga berpengaruh pada pola penanganannya, SDM dan sarpras pendukungnya masih kurang memadai, dan masih kurangnya koordinasi antar SKPD dalam penanganan lansia ini.
- 3) Masih kurangnya pembinaan organisasi sosial/ panti disebabkan oleh data orsos yang kurang update, manajemen pengelolaan yang masih lemah, dan belum adanya bantuan anggaran guna menunjang kegiatan operasional.

- 4) Penanganan anak nakal/ anak jalanan masih belum optimal karena pembinaan yang masih belum tuntas karena baru menyentuh sebagian anak nakal dan anak jalanan yang ada.

14. Urusan Ketenagakerjaan

Permasalahan yang selalu dihadapi dalam ketenagakerjaan adalah:

- 1) Peserta pelatihan berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat rata-rata berpendidikan rendah yang berpengaruh pada lambannya penyerapan materi pelatihan, kurangnya disiplin dan kurangnya motivasi bekerja. Disamping itu modal/sarana usaha menjadi permasalahan mendasar bagi peserta pelatihan untuk memulai usahanya.
- 2) Rendahnya kualitas lembaga pelatihan kerja yang ada dikarenakan belum terakreditasinya kelembagaan pelatihan kerja dan kurang profesionalnya sumber daya manusia (SDM) pengelola lembaga pelatihan sehingga kompetensi lulusan yang dihasilkan belum optimal.
- 3) Kesempatan kerja yang ada di dalam kota tidak sesuai dengan minat, bakat dan kualifikasi pencari kerja, sementara untuk bekerja di luar daerah bukan suatu hal yang menarik bagi para pencari kerja, hal ini memicu adanya pengangguran.
- 4) Belum adanya koordinasi antar stakeholder dalam menindaklanjuti investasi yang datang ke Kota Cilegon berkaitan dengan kewajiban perusahaan/investor dalam

memenuhi hak-hak pekerja (upah, jaminan sosial, pemenuhan K3 dan norma perlindungan pekerja).

- 5) Belum optimalnya penegakan peraturan ketenagakerjaan khususnya norma perlindungan tenaga kerja dan norma keselamatan kerja dikarenakan impact yang ditimbulkan menjadikan munculnya permasalahan lain.

15. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Kendala dalam pengembangan koperasi yaitu :

- 1) Rendahnya manajemen usaha, seringkali ada yang belum melakukan pemisahan antara bisnis/usaha dan rumah tangga.
- 2) Belum memiliki legitimasi tempat usaha.
- 3) Belum memiliki legitimasi hukum atas asset, sehingga terjadi kesulitan dalam mengakses kredit perbankan.
- 4) Rendahnya kualitas SDM, sehingga pola kemitraan sulit diterapkan baik di bidang produksi, pemasaran maupun teknologi.
- 5) Rendahnya ketersediaan skim permodalan secara khusus bagi UKM.

16. Urusan Penanaman Modal

Permasalahan-permasalahan yang ada dalam pengembangan investasi di daerah, antara lain :

- 1) Masih belum efektifnya peningkatan promosi tentang daya saing Kota Cilegon bagi investor ;

- 2) Kurang optimalnya dukungan terhadap potensi investasi karena kekurangsiapan sumberdaya dan sarana prasarana dalam menarik investor termasuk terbatasnya lahan dan infrastruktur.

17. Urusan Kebudayaan

Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan kebudayaan antara lain:

- 1) Belum memadainya kualitas sumber daya manusia seni dan budaya,
- 2) Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan seni dan budaya daerah serta fasilitasi penyelenggaraan berbagai even seni dan budaya yang dikemas secara atraktif dan menarik serta berskala regional.
- 3) Belum optimalnya pelestarian dan pengelolaan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya.
- 4) Belum optimalnya perlindungan dan pelestarian terhadap kekayaan budaya nasional/ daerah, sehingga sangat rentan untuk diambil alih/ diakui oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
- 5) Masih kurangnya inventarisasi dan penggalan jenis dan ragam budaya daerah Kota Cilegon.
- 6) Belum optimal dan efektifnya promosi dan pemasaran budaya daerah.
- 7) Lunturnya nilai-nilai etika, moral, budaya dan keagamaan pada masyarakat disebabkan belum optimalnya pembinaan/pendidikan moral, etika dan budi pekerti bagi

para remaja dan siswa sekolah dan pengaruh negatif globalisasi khususnya budaya asing yang merusak.

18. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olah raga yaitu:

- 1) Rendahnya partisipasi pemuda dalam pembangunan disebabkan rendahnya tingkat pendidikan dan ketrampilan, kurangnya kepedulian terhadap masalah-masalah pembangunan, keterbatasan akses dan kemitraan dengan pemerintah, serta lemahnya lembaga pemuda.
- 2) Rendahnya kemandirian, kualitas kepeloporan, kepemimpinan, nasionalisme dan wawasan kebangsaan.
- 3) Kurangnya ketrampilan, daya kreasi dan inovasi pemuda.
- 4) Kurangnya daya tangkal pemuda terhadap berbagai pengaruh negatif yang merusak yang berakibat perilaku negatif pemuda seperti penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang, pergaulan bebas, radikalisme, terorisme, vandalisme, bahkan tidak menutup kemungkinan bertindak kriminal.
- 5) Terjadinya pengangguran sebagai akibat rendahnya tingkat pendidikan dan ketrampilan, tidak sesuainya kualifikasi yang dibutuhkan pasar kerja dengan kompetensi pendidikan yang dimiliki, kurangnya kemandirian, dan sempitnya lapangan kerja.
- 6) Kurangnya sarana prasarana pendukung kegiatan kepemudaan seperti sport center.

- 7) Penurunan prestasi olahraga Kota Cilegon karena kurangnya penghargaan dan perlindungan terhadap atlet berprestasi sehingga diambil daerah lain, kurangnya ajang latihan tanding dan monitoring prestasi atlet, lemahnya pembibitan atlet sejak usia muda, belum adanya klub olahraga di sekolah-sekolah, dan kurang memadainya sarana prasarana olahraga.
- 8) Kurang optimalnya sinkronisasi dan koordinasi pembangunan olahraga antara Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda Olahraga, Pengurus Daerah dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Cilegon.

19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Beberapa potensi masalah dalam penyelenggaraan urusan ini yaitu:

- 1) Forum lintas agama, lintas suku dan forum pertemuan organisasi sosial-politik lain perlu dikembangkan dan dimantapkan untuk semakin menumbuhkan solidaritas dan nasionalisme antar umat beragama
- 2) Menyongsong pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah Kota Cilegon, maka perlu untuk memelihara ketentraman dan ketertiban umum sebelum, selama dan setelah pelaksanaan. Sosialisasi dan kampanye anti golput seyogyanya dilaksanakan, agar masyarakat sadar untuk menggunakan hak pilihnya sehingga angka partisipasi politik meningkat.
- 3) Masih perlu penanganan penyakit masyarakat untuk menciptakan Kota Cilegon yang nyaman dan aman.

- 4) Perlunya sosialisasi dan kampanye aktif tentang gerakan anti narkoba dan zat adiktif lain kepada seluruh elemen masyarakat mengingat belum adanya Badan Narkotika Nasional di wilayah Kota Cilegon.
- 5) Perlunya penguatan fungsi koordinasi antar pihak terkait mengingat penanganan bencana di Kota Cilegon masih bersifat lintas sektoral sehingga perlu pembagian tugas dan kewenangan yang jelas dari seluruh pihak terkait.

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Masalah yang dihadapi dalam rangka penyelenggaraan urusan ini meliputi:

- 1) Belum sinerginya peraturan perundangan yang yang diterbitkan pemerintahan pusat dan daerah, yang berakibat pada terjadinya tumpang tindih, perbedaan persepsi dan kekosongan peraturan perundangan yang berlaku;
- 2) Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan umum dalam pelayanan publik yang disebabkan oleh kurangnya kapasitas, kompetensi dan profesionalitas SDM aparatur berikut sarana dan prasarana yang dibutuhkan;
- 3) Masih perlunya intensifikasi penerapan E-Government di seluruh SKPD dengan memaksimalkan system informasi, penggunaan WAN dan website;

- 4) Belum optimalnya kerja sama antar daerah, daerah dengan swasta dan daerah dengan perguruan tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
- 5) Belum sebandingnya peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari pusat dan pendapatan asli daerah dengan pembiayaan yang harus dikeluarkan daerah;
- 6) Kurang tuntasnya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran disiplin pegawai;
- 7) Banyaknya hasil temuan pemeriksaan interen yang mencerminkan ketidakdisiplinan pengelolaan anggaran;
- 8) Rendahnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan (litbang) yang digunakan sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan di pemerintah daerah;

21. Urusan Ketahanan Pangan

Permasalahan yang senantiasa dihadapi dalam penyelenggaraan urusan ketahanan pangan adalah:

- 1) Alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian serta belum adanya regulasi yang mengatur tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, akan berdampak buruk bagi ketahanan pangan di Kota Cilegon.
- 2) Produksi pangan lokal belum mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduk Kota Cilegon.
- 3) Pola konsumsi pangan penduduk Kota Cilegon didominasi oleh karbohidrat, sementara pangan yang mengandung protein, lemak, dan mineral kurang dikonsumsi. Hal ini

dipengaruhi oleh rendahnya pengetahuan dan tingkat pendapatan masyarakat.

- 4) Belum optimalnya peran Kota Cilegon sebagai fasilitator perdagangan dengan membuka pusat pergudangan dan transit area bagi distribusi komoditas.
- 5) Masih adanya penggunaan zat aditif (penyedap, pewarna, pemanis, pengawet, pengental, pemucat dan anti gumpal) pada bahan pangan yang diproduksi oleh pedagang makanan, menandakan belum optimalnya kinerja bidang keamanan pangan.
- 6) Belum ada sangsi yang tegas terhadap pelanggaran peraturan keamanan pangan.

22. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Hambatan-hambatan yang ditemui dalam upaya pemberdayaan masyarakat adalah:

- 1) Masih perlunya pembangunan kapasitas sistem, baik sistem pemerintahan maupun sistem yang ada di masyarakat
- 2) Masih perlunya peningkatan sumber daya manusia
- 3) Masih rendahnya peran aktif dan kemampuan masyarakat dalam pendayagunaan teknologi tepat guna untuk mengembangkan keunggulan komparatif dan kompetitif
- 4) Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 5) Masih terdapat jumlah penduduk dan rumah tangga miskin

23. Urusan Statistik

Statistik berkaitan dengan penyediaan data yang harus selalu mengikuti perkembangan terkini (*up to date*). Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan statistik yaitu:

- 1) Kurangnya ketersediaan data dasar yang akurat dan tepat waktu.
- 2) Belum optimalnya kerjasama antar SKPD dalam pengelolaan dan penyediaan data;
- 3) Belum optimalnya penggunaan sistem informasi data yang baik;
- 4) Kurangnya tenaga profesional yang khusus menangani masalah pendataan di tiap SKPD.
- 5) Data dan referensi yang digunakan tidak konsisten
- 6) Duplikasi dalam pengumpulan dan pengolahan data
- 7) Belum tingginya kesadaran aparatur akan pentingnya data.

24. Urusan Kearsipan

Permasalahan yang dihadapi pada penyelenggaraan urusan kearsipan yaitu:

- 1) Belum optimalnya sistem kearsipan yang disebabkan oleh kurangnya SDM dan sarana dan prasarana kearsipan serta rendahnya perhatian dan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem kearsipan;

- 2) Belum optimalnya penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara banyaknya arsip dengan jumlah SDM yang menangani;
- 3) Kurangnya khasanah arsip yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya arsip;
- 4) Belum optimalnya pelayanan informasi kearsipan daerah yang disebabkan oleh belum tersedianya sistem informasi kearsipan yang memadai.

25. Urusan Komunikasi dan Informatika

Beberapa permasalahan yang menjadi kendala dalam penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika di antaranya:

- 1) Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sistem informatika yang memadai untuk mendukung efisiensi pelayanan publik dan transparansi.
- 2) Belum optimalnya jangkauan dan akses komunikasi informasi yang disebabkan masih terbatasnya sarana dan prasarana serta pengembangan komunikasi informasi.
- 3) Belum optimalnya penelitian di bidang komunikasi dan informasi yang disebabkan oleh belum terintegrasinya kegiatan penelitian dalam suatu jaringan penelitian yang efektif.
- 4) Masih lemah dan kurangnya kualitas SDM di bidang komunikasi dan informasi yang disebabkan oleh kesenjangan antara kemajuan IPTEK yang sangat cepat

dengan penguasaan teknologi oleh aparatur bidang komunikasi dan informasi.

- 5) Masih kurangnya pemahaman tentang aturan-aturan baru yang terkait di bidang komunikasi dan informatika.

26. Urusan Perpustakaan

Permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan urusan perpustakaan di Kota Cilegon yaitu:

- 1) Perlunya optimalisasi untuk lebih meningkatkan minat baca di dalam masyarakat yang disebabkan oleh masih kurangnya budaya membaca masyarakat;
- 2) Perlunya peningkatan kualitas pelayanan perpustakaan (perpustakaan daerah, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan khusus/instansi, perpustakaan kelurahan, perpustakaan rumah ibadah, dan perpustakaan sekolah).
- 3) Kurangnya kesadaran masyarakat tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam.

27. Urusan Pertanian

Permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pertanian di Kota Cilegon yaitu:

- 1) Tidak tercapainya target produksi dan produktivitas tanaman pangan (padi) karena disebabkan oleh cuaca dimana curah hujannya rendah sehingga mengalami kekeringan.

- 2) Tidak tercapainya produksi daging unggas dan hewan ternak serta telur dikarenakan kondisi pakan ternak yang terbatas serta tingginya harga pakan unggas.
- 3) Masih rendahnya produksi melon akibat serangan organisme pengganggu tanaman seperti (bercak daun dan kerving)
- 4) Kurangnya pemahaman petani dalam hal penerapan budidaya melon terkait dengan penggunaan sarana produksi seperti pestisida dan pupuk.
- 5) Masih tingginya harga pakan unggas, sehingga perlu mencari pakan alternatif yang banyak tersedia, murah dan bermutu.
- 6) Belum terbiasanya masyarakat mengkonsumsi produk susu kambing karena masih kurangnya promosi.

28. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Pada program Pengembangan Potensi Sumber Daya Energi dan Mineral terdapat permasalahan berupa masih belum terselesaikannya sambungan listrik (SR) disebabkan adanya keterbatasan anggaran yang tersedia.

29. Urusan Pariwisata

Permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pariwisata di Kota Cilegon yaitu:

- 1) Belum optimalnya kunjungan jumlah wisatawan nusantara yang disebabkan: perlunya peningkatan daya saing dan daya tarik destinasi pariwisata, belum

optimalnya pengelolaan obyek wisata, semakin ketatnya persaingan destinasi pariwisata dengan wilayah sekitar, belum optimalnya promosi, informasi dan pemasaran pariwisata; kualitas sarana dan prasarana destinasi pariwisata kurang memadai; kurangnya kreativitas, kreasi, dan atraksi pariwisata; kualitas fasilitas pendukung destinasi pariwisata belum memadai; kurangnya kenyamanan dan keamanan bagi wisatawan; dan kurang memadainya sumber daya manusia di bidang pariwisata.

- 2) Belum optimalnya penyelenggaraan even pariwisata yang dilaksanakan secara periodik yang dikemas dalam atraksi yang menarik dan atraktif serta berskala luas sehingga mampu menarik wisatawan berkunjung.
- 3) Masih lemahnya koordinasi pembangunan kepariwisataan antara pemerintah dengan swasta sebagai akibat belum terbentuknya Badan Koordinasi Pariwisata.

30. Urusan Kelautan dan Perikanan

Permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan di Kota Cilegon yaitu:

- 1) Belum memadainya sarana dan prasarana alat tangkap ikan yang dimiliki nelayan sehingga peningkatan produksi ikan tangkap belum mengalami kenaikan yang signifikan
- 2) Masih terbatasnya wilayah pemijahan ikan laut karena kerusakan habitatnya menyebabkan hasil tangkap ikan nelayan kecil di wilayah perairan laut cilegon sangat minim
- 3) Budidaya perikanan belum mengalami perkembangan yang baik karena adanya keterbatasan sumber daya airnya.

- 4) Tingkat konsumsi ikan masyarakat cilegon masih lebih rendah daripada tingkat konsumsi ikan tingkat propinsi dan tingkat Nasional. Hal ini mungkin disebabkan oleh tingkat preferensi masyarakat Kota cilegon terhadap daging ikan masih sangat rendah.

31. Urusan Perdagangan

Permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan urusan perdagangan di Kota Cilegon yaitu:

- 1) Jumlah sarana prasarana pasar yang tidak dapat menampung seluruh pedagang yang ada di pasar. Sehingga masih banyak pedagang yang menggelar dagangannya pada fasilitas pasar seperti jalan dan halaman pasar yang mengakibatkan kemacetan akses pasar dan menimbulkan kesan tidak tertata rapih.
- 2) Sarana prasarana kios/los pasar yang sudah kondisinya sudah tidak layak seperti dinding yang rusak atau atap yang rapuh dan bocor. Selain itu juga halaman pasar yang tidak ada perkerasannya lagi serta selokan air yang sudah tertutup tanah atau sampah. Kondisi ini terdapat pada pasar milik perorangan/swasta yaitu pasar tegal bunder, pasar krenceng dan pasar suralaya.
- 3) Sarana prasarana pemadam kebakaran baru dapat dipenuhi pada satu pasar milik pemerintah Kota Cilegon (pasar kranggot) dari 3 (tiga) pasar milik pemerintah Kota Cilegon. Kondisi ini cukup menghawatirkan jika terjadi kebakaran pada pasar Merak dan Pasar Kavling blok F.

32. Urusan Industri

Berdasarkan identifikasi lapangan, permasalahan umum yang dihadapi oleh pelaku usaha industri kecil dan menengah di Kota Cilegon saat ini adalah lemahnya daya saing dengan pelaku usaha industri sejenis dari luar kota cilegon. Kelemahan daya saing ini disebabkan antara lain pada sisi ketersediaan bahan baku, permodalan, sumber daya manusia (keterampilan, pengetahuan dan inovasi produksi) serta manajemennya. Kelemahan ini mengakibatkan sulitnya pengembangan usaha dan pertumbuhan industri kecil dan menengah di Kota Cilegon.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang tidak diatasi. Untuk mengefektifkan sistem perencanaan pembangunan daerah dan bagaimana visi/misi daerah dibuat dengan sebaik-baiknya, dibutuhkan pengetahuan yang mendalam tentang kekuatan dan kelemahan sehubungan dengan peluang dan tantangan yang dihadapi.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya.

Lebih teknis, untuk mendapatkan rumusan masalah tahun rencana langkah yang harus dilakukan adalah dengan mengidentifikasi isu-isu penting dan masalah mendesak dari berbagai langkah awal pada analisis daerah dan analisis kebijakan nasional/provinsi. Pada tingkat nasional mengidentifikasi isu-isu penting yang terjadi pada tingkat nasional yang ada keterkaitannya dengan daerah, sedangkan pada tingkat daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dilakukan analisis daerah dan analisis kebijakan nasional/provinsi untuk mengidentifikasi isu-isu penting dan masalah mendesak yang terjadi pada daerah. Berikut ini diuraikan tentang Identifikasi Permasalahan Pembangunan Dari Kebijakan Nasional, Provinsi Banten Dan Lingkungan Eksternal Lainnya yang berpengaruh terhadap permasalahan pembangunan di Kota Cilegon.

Tabel 2.118

Identifikasi Permasalahan Pembangunan dari Kebijakan Nasional/Provinsi dan Lingkungan Eksternal Lainnya

No.	Isu Strategis dan Permasalahan Mendesak		
	Nasional	Provinsi Banten	Lingkungan Eksternal Lainnya
1	Pendidikan	Pendidikan	Pendidikan
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum optimalnya pendidikan karakter bangsa ➤ Masih terbatasnya kesempatan memperoleh pendidikan ➤ Rendahnya kualitas, relevansi, dan masih rendahnya daya saing pendidikan ➤ Masih rendahnya profesionalisme guru dan belum meratanya distribusi guru ➤ Terbatasnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum memadainya akses masyarakat terhadap pendidikan yang bermutu dan terjangkau ➤ Belum memadainya kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan ➤ Belum memdainya profesionalisme guru dan belum meratanya distribusi guru ➤ Belum memadainya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan ➤ Belum efektifnya manajemen dan tatakelola 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti jenjang pendidikan pada usia dini. ➤ Belum adanya pemetaan kebutuhan sekolah seperti rasio kebutuhan satuan pendidikan terhadap permukiman permanen, sehingga menyebabkan ketidakseimbangan rombongan belajar. ➤ Masih terbatasnya ketersediaan tenaga pengajar dalam mengembangkan kemampuan peserta didik dan masih belum optimalnya penerapan RPP berdasarkan silabus. ➤ Masih belum optimalnya rasio guru terhadap murid, sehingga ada beberapa guru mengajar lebih dari satu mata pelajaran, semata mata hanya untuk memenuhi standar jam wajib tatap muka antara murid dan guru. ➤ Evaluasi diri sekolah belum berjalan secara

No.	Isu Strategis dan Permasalahan Mendesak		
	Nasional	Provinsi Banten	Lingkungan Eksternal Lainnya
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum efektifnya manajemen dan tatakelola pendidikan ➤ Belum terwujudnya pembiayaan pendidikan yang berkeadilan 	<ul style="list-style-type: none"> pendidikan ➤ Belum memdainya pembiayaan pendidikan 	optimal.
2	Kesehatan	Kesehatan	Kesehatan
	<ul style="list-style-type: none"> • Masih rendahnya status kesehatan ibu dan anak terutama pada pelayanan persalinan dan cakupan imunisasi • Masih rendah dan tidak signifikannya kenaikan pemakaian kontrasepsi • Masih rendahnya status gizi masyarakat • Belum optimalnya upaya pengendalian penyakit yang ditandai dengan tingginya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular serta masih rendahnya kualitas kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih rendahnya status kesehatan ibu dan anak terutama pada pelayanan persalinan dan cakupan imunisasi • Masih rendah dan tidak signifikannya kenaikan pemakaian kontrasepsi • Masih rendahnya status gizi masyarakat • Belum optimalnya upaya pengendalian penyakit yang ditandai dengan tingginya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular serta masih rendahnya kualitas kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan kesehatan ibu dan anak yang sesuai standar masih terbatas • Belum teratasinya permasalahan gizi secara menyeluruh • Masih tingginya kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular • Proporsi pembiayaan kesehatan bersumber dari APBD Kota Cilegon belum masih mengutamakan prasarana dan sarana Kesehatan belum mengutamakan upaya pencegahan, promosi kesehatan, peningkatan pelayanan lansia, peningkatan pelayanan balita dan keselamatan ibu melahirkan dan anak. • Jumlah dan jenis tenaga kesehatan terus meningkat namun kebutuhan dan pemerataan distribusinya belum terpenuhi. Kualitas tenaga kesehatan juga perlu untuk ditingkatkan. Masalah

No.	Isu Strategis dan Permasalahan Mendesak		
	Nasional	Provinsi Banten	Lingkungan Eksternal Lainnya
	<p>lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> Masih terbatasnya jumlah, distribusi dan kualitas tenaga kesehatan, terutama di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan Masih terbatasnya ketersediaan obat serta belum optimalnya pengawasan obat dan makanan; yang ditandai dengan belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan kefarmasian yang berkualitas Masih terbatasnya pembiayaan kesehatan untuk memberikan jaminan perlindungan kesehatan masyarakat, terutama bagi penduduk miskin dan pekerja sektor informal Belum optimalnya upaya pemberdayaan 	<p>lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> Masih terbatasnya jumlah, distribusi dan kualitas tenaga kesehatan, terutama di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan Masih terbatasnya ketersediaan obat serta belum optimalnya pengawasan obat dan makanan; yang ditandai dengan belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan kefarmasian yang berkualitas Masih terbatasnya pembiayaan kesehatan untuk memberikan jaminan perlindungan kesehatan masyarakat, terutama bagi penduduk miskin dan pekerja sektor informal Belum optimalnya upaya pemberdayaan masyarakat 	<p>kurangnya tenaga kesehatan, baik jumlah, jenis dan distribusinya menimbulkan dampak terhadap rendahnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan berkualitas, di samping itu juga menimbulkan permasalahan pada rujukan dan penanganan pasien untuk kasus tertentu.</p> <ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat esensial, penggunaan obat yang tidak rasional dan penyelenggaraan pelayanan kefarmasian yang berkualitas Masyarakat cenderung masih ditempatkan sebagai obyek dalam pembangunan kesehatan, promosi kesehatan belum optimal merubah perilaku masyarakat menjadi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Disamping itu pemanfaatan dan kualitas Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), seperti Posyandu dan Poskesdes perlu untuk terus ditingkatkan dan dioptimalkan.

No.	Isu Strategis dan Permasalahan Mendesak		
	Nasional	Provinsi Banten	Lingkungan Eksternal Lainnya
	<p>masyarakat dan promosi kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none"> Masih rendahnya akses masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas Masih lebarnya kesenjangan status kesehatan dan gizi masyarakat antarwilayah dan antartingkat sosial ekonomi Belum efektifnya manajemen pembangunan kesehatan, termasuk dalam pengelolaan administrasi, hukum, dan penelitian pengembangan kesehatan Masih rendahnya akses masyarakat terhadap air minum dan sanitasi, persampahan, dan drainase 	<p>dan promosi kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none"> Masih rendahnya akses masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas Masih lebarnya kesenjangan status kesehatan dan gizi masyarakat antarwilayah dan antartingkat sosial ekonomi Belum efektifnya manajemen pembangunan kesehatan, termasuk dalam pengelolaan administrasi, hukum, dan penelitian pengembangan kesehatan Masih rendahnya akses masyarakat terhadap air minum dan sanitasi, persampahan, dan drainase 	
3	Infrastruktur	Infrastruktur Wilayah Dan	Infrastruktur Wilayah Dan Kawasan

No.	Isu Strategis dan Permasalahan Mendesak		
	Nasional	Provinsi Banten	Lingkungan Eksternal Lainnya
		Kawasan	
3.1	<p>Infrastruktur sumber daya air terutama dalam pengendalian banjir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tingginya tingkat kerusakan daerah tangkapan air dan perubahan iklim yang menyebabkan frekuensi dan intensitas bahaya banjir semakin meningkat • Buruknya sistem drainase mikro dan pembuangan sampah di badan sungai yang menyebabkan terjadinya banjir pada daerah perkotaan, seperti jakarta, semarang, dan surabaya • Tingginya eksploitasi air tanah yang menyebabkan penurunan muka tanah (land subsidence), sehingga meningkatkan resiko banjir 	<ul style="list-style-type: none"> • Percepatan pembangunan ruas Jalan Lingkar Selatan (JLS) dan Jalan Lingkar Utara (JLU) untuk mengatasi kemacetan kearah Kawasan Wisata Anyer, Kawasan Industri Bojonegara dan Pelabuhan Penyeberangan Merak. • Optimasi Pengembangan Kawasan Terminal Terpadu Merak dan percepatan pembangunan Terminal Angkutan Kota Seruni. • Penanganan banjir perkotaan. • jaringan sumber daya air baku untuk kebutuhan air minum di Wilayah Kota Cilegon dan sekitarnya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ruas jalan protokol yang kecil tidak sebanding dengan banyaknya jumlah kendaraan yang melintas. • Tumbuhnya pusat-pusat kegiatan (perkantoran, perdagangan dan jasa) di sepanjang jalan protokol yang tidak dilengkapi dengan lahan parkir yang memadai. • Banyaknya awak angkutan kota yang tidak mematuhi rute yang telah ditentukan sehingga semua angkutan kota hanya tertumpu pada ruas jalan protokol. • Tingginya biaya BBM menyebabkan tingginya ongkos angkutan kota. Namun di sisi lain akses masyarakat dalam kepemilikan sepeda motor semakin mudah yang pada akhirnya berakibat pada banyaknya angkutan kota yang kosong karena tidak ada penumpang. • Pelayanan perhubungan laut oleh Dishub Kota Cilegon terkendala oleh batasan wilayah laut yang menjadi kewenangan Kota, yaitu hanya 4 mil wilayah laut, sehingga tidak ada kegiatan pelayanan perhubungan laut yang signifikan karena telah dilakukan oleh ADPEL.

No.	Isu Strategis dan Permasalahan Mendesak		
	Nasional	Provinsi Banten	Lingkungan Eksternal Lainnya
	<ul style="list-style-type: none"> • Terhambatnya pelaksanaan pembangunan prasarana pengendali banjir akibat lambatnya proses pembebasan tanah • Padatnya pemukiman dan aktivitas di bantaran sungai yang menghambat upaya pengendalian banjir • Dampak perubahan iklim yang menyebabkan kenaikan muka air laut, sehingga memicu terjadinya banjir rob/pasang air laut, abrasi pantai, dan gelombang pasang yang mengancam kawasan pantai indonesia, terutama pada daerah yang menjadi pusat-pusat perekonomian, perkotaan, permukiman, dan industri. 		
4	Iklim Investasi dan Iklim Usaha		Iklim Investasi dan Iklim Usaha

No.	Isu Strategis dan Permasalahan Mendesak		
	Nasional	Provinsi Banten	Lingkungan Eksternal Lainnya
4.1	Belum harmonisnya antar peraturan di tingkat pusat, dan belum sinkronnya peraturan pusat dan daerah		<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Penanaman Modal upaya yang masih belum memenuhi percepatan dan perluasan jangkauan promosi perlu promosi yang lebih tepat dan efisien dengan jangkauan yang lebih luas
4.2	Masih banyaknya pungutan dan retribusi yang membebani pengusaha		
4.3	Masih banyaknya perda bermasalah di daerah, merupakan kendala yang masih harus terus menerus diperbaiki		
4.4	Pertanahan mulai dari ketersediaan peta sampai dengan pendaftaran tanah telah membawa resiko terjadinya sertifikat ganda dan sengketa lahan yang berpotensi menurunkan daya tarik investasi domestik		
5	Bidang Perekonomian		
5.1	Tenaga kerja:		Ketenagakerjaan

No.	Isu Strategis dan Permasalahan Mendesak		
	Nasional	Provinsi Banten	Lingkungan Eksternal Lainnya
	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu dilakukan peningkatan pelayanan dan perlindungan TKI selama persiapan, pemberangkatandan kepulangan. • Kualitas pelayanan dan perlindungan bagi TKI masih rendah, yang antara lain ditunjukkan oleh keterbatasan akses informasi mengenai prosedur bekerja di luar negeri, mahal nya biaya persiapan keberangkatan, masih maraknya praktek percaloan, pemalsuan dokumen, dan penempatan ilegal di luar negeri, masih rendahnya pengetahuan dan kompetensi calon TKI, dan lain-lain. Hal ini menyebabkan jumlah TKI yang menghadapi masalah saat bekerja di luar negeri masih tinggi. Penanganan 		<ul style="list-style-type: none"> • Belum memadainya kualitas, produktivitas dan kompetensi tenaga kerja

No.	Isu Strategis dan Permasalahan Mendesak		
	Nasional	Provinsi Banten	Lingkungan Eksternal Lainnya
	TKI bermasalah ini menimbulkan biaya tinggi bagi Pemerintah. Oleh karena itu tantangan pokok ke depan adalah meningkatkan pelayanan bagi TKI di dalam negeri serta meningkatkan pengetahuan dan kompetensi TKI. Terkait dengan SIM TKI, tantangan yang dihadapi adalah memperluas jangkauan SIM TKI ke seluruh Indonesia, sejalan dengan selesainya pengadministrasian NIK secara nasional. Selain itu, masih sangat diperlukan peningkatan pelayanan dan perlindungan TKI di luar negeri. Untuk membantu TKI bermasalah di luar negeri, telah dibangun tempat penampungan (shelter) di beberapa		

No.	Isu Strategis dan Permasalahan Mendesak		
	Nasional	Provinsi Banten	Lingkungan Eksternal Lainnya
	perwakilan RI. Tantangan lainnya adalah menyelesaikan masalah-masalah TKI yang belum terselesaikan (pending) dengan pemberian bantuan hukum atau lawyer		